

## **Penerimaan CPNS**

1. UU No. [43 tahun 1999](#) : Perubahan atas UU No. [08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. PP No. [56 Tahun 2012](#) : Perubahan Kedua Atas PP no. [48 Tahun 2005](#) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Perubahan yang Pertama PP no. [43 Tahun 2007](#)
3. PP no. [01 Tahun 1983](#) : Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Teras Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
4. Perka BKN no. [9 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan)
5. Permenpan & RB no. [233 tahun 2012](#) : Perubahan atas Permenpan no. [197 Tahun 2012](#) : Kebijakan an Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
6. [SE MENPAN no. 03 Tahun 2012](#) tentang data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II
7. Perka BKN no. [7 Tahun 2008](#) : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
8. Perka BKN no. [43 tahun 2007](#) : Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
9. Perka BKN no. [22 tahun 2007](#) : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
10. Perka BKN no. [13A tahun 2006](#) : Petunjuk Penetapan NIP CPNS
11. Kepka BKN no. [38 Tahun 2003](#) : Bentuk Persetujuan Teknis Pengangkatan PNS bagi CPNS yang Menjalani Masa Percobaan Lebih dari 2 Tahun
12. Pedoman [Nomor Induk Pegawai](#) , [Kartu Pegawai Negeri Sipil](#) , [KARIS/KARSU](#) , [TA SPEN](#) ,  
[ASKES](#)
13. [Manajemen Kepegawaian Negara](#) oleh Bapak Rusdi Laili
14. [Mengetahui Masa Kerja PNS \(Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun\)](#)

## **Pengadaan PNS**

1.
  1. PP no. [11 Tahun 2002](#) : Perubahan atas PP no. [98 tahun 2000](#) tentang pengadaan PNS
  2. Kepka BKN no. [11 Tahun 2002](#) : Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang **mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A** ) atau

## [unduh di sini](#)

3. [Pedoman Pengadaan PNS](#)

### **Formasi PNS**

1.
  1. [Petunjuk dan Formulir Formasi PNS Tahun Anggaran 2013](#)
  2. PP no. [54 Tahun 2003](#) : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor [97 tahun 2000](#) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  3. [Pedoman formasi PNS](#)

### **Penghargaan Pengalaman Kerja Masa Lampau**

1. PP no. [11 Tahun 2002](#) pasal 13 menjelaskan:  
Pada saat pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
2. PP no. [38 Tahun 1964](#) : Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Kerja bagi PNS
3. [Prosedur Peninjauan Masa Kerja](#)
4. [Cara Menghitung Masa Kerja Golongan](#)
5. [Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan](#)

### **Pakaian PNS**

1. Keppres no. [18 Tahun 1972](#) : Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. [50 Tahun 1990](#)

### **Larangan Menjadi Anggota Partai**

1.
  1. PP no. [37 Tahun 2004](#) : Larangan PNS menjadi anggota partai politik
  2. PP no. [05 tahun 1999](#) : Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
  3. [Pedoman Larangan Menjadi Anggota Partai](#)

### **Pembatasan dalam Usaha Swasta**

1. PP no. [06 Tahun 1974](#) : Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta, atau [di sini](#)

### **Pernikahan PNS**

1.
  1. UU no. [01 Tahun 1974](#) : Perkawinan
  2. PP no. [45 Tahun 1990](#) : Perubahan atas PP no. [10 tahun 1983](#) tentang izin perkawinan perceraian PNS
  3. PP no. [09 Tahun 1975](#) : Peraturan Pelaksanaan [UU 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan ([situs asli](#))
  4. SE Kepala BKN [no. 48 tahun 1990](#) : Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  5. [Pedoman Pernikahan PNS](#)

### **Kenaikan Pangkat PNS**

1.
  1. PP no. [63 tahun 2009](#) : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. [9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  2. PP no. [12 Tahun 2002](#) : Perubahan PP [99 tahun 2000](#) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  3. PP no. [20 Tahun 1991](#) : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  4. Perka BKN no. [2 Tahun 2011](#) : Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
  5. Kepka BKN no. [12 Tahun 2002](#) : Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  6. [Pedoman Kenaikan Pangkat PNS](#)

### **Pengangkatan dalam Jabatan Struktural**

1.
  1. PP no. [13 Tahun 2002](#) : Perubahan atas PP no [100 tahun 2000](#) tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

2. Permenpan & RB no. [34 Tahun 2011](#) : Pedoman Evaluasi Jabatan, [Lampiran](#)
3. Permenpan & RB no. [33 Tahun 2011](#) : Pedoman Analisa Jabatan, [Lampiran](#)
4. [KEP/61/M.PAN/8/2004](#) : Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
5. Perka BKN no. [13 Tahun 2011](#) : Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
6. Perka BKN no. [12 Tahun 2011](#) : Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
7. Kepka BKN no. [13 Tahun 2002](#) : Juknis PP no. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
8. Kepka BKN no. [09 tahun 2006](#) : Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
9. [Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural](#)

### **Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional**

1.
  1. PP no. [40 Tahun 2010](#) : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah [No.16 Tahun 1994](#) Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  2. Perpres no. [97 tahun 2012](#) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. [87 tahun 1999](#) tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. [Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional](#)

### **Larangan Jabatan Rangkap bagi PNS**

1. PP no. [47 Tahun 2005](#) : Perubahan atas PP [29 Tahun 1997](#) tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap

### **Peraturan Gaji PNS**

1. PP no. [57 Tahun 2012](#) : Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
2. PP no. [15 Tahun 2012](#) : Perubahan Keempat Belas atas PP no. [07 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji PNS dan [Lampiran](#)

3. [Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terkait dengan status kepegawaian bagi PNS](#) , terbitan BKN tahun 2008, berlaku untuk semua PNS.

### **Tunjangan PNS**

1.
  1. Tunjangan Keluarga, [Kepres No. 17 tahun 2000](#) pasal 29, [PP no. 13 tahun 1980](#) Pasal 1
  2. Tunjangan Pangan (PerDirjen Perbendaharaan No. [PER-11/PB/2012](#) )
  3. [Tunjangan Jabatan Struktural PNS](#) :
    - (1) Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Perpres no. [26 Tahun 2007](#) )
    - (2) Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Anggota POLRI (Perpres no. [27/2007](#) untuk TNI dan no. [28/2007](#) untuk POLRI)
  4. Tunjangan Jabatan Fungsional atau Dipersamakan: [SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006](#)
    - (1) Tunjangan Fungsional PNS ( ada 42 jenis jabatan fungsional PNS silakan baca lampiran I, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
    - (2) Tunjangan Fungsional Anggota POLRI ( ada 6 jenis silakan baca lampiran II, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
    - (3) Tunjangan Fungsional AnggotaTNI ( ada 11 jenis silakan baca lampiran III, SE Dirjen Anggaran No S-6053/PB/2006 )
  5. Perka BKN no. [39 tahun 2007](#) : Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
  6. Tunjangan Umum ( bagi yang tidak termasuk S/F/D), Perpres no. [12 Tahun 2006](#)
  7. Kepka BKN no. [18 tahun 2006](#) : Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
  8. Tunjangan Kinerja, baca [Tunjangan Kinerja Pegawai](#)
  9. Tunjangan Kemahalan Daerah/Tunjangan khusus Propinsi Papua, Keppres no. [68 Tahun 2002](#)
  10. Tunjangan Resiko/Tunjangan Kompensasi Kerja, Perpres no. [88 Tahun 2006](#)  
Tunjangan Beresiko bagi Petugas Permaryatan,  
[Keppres no. 48 Tahun 1995](#)  
/Radiasi,  
[Keppres no. 59 Tahun 2001](#)  
/Persandian,  
[Keppres no. 42 Tahun 2004](#)  
/Nuklir,  
[Perpres no. 24 Tahun 2005](#)  
/Arsip Statis,  
[Perpres no. 48 Tahun 2005](#)

/Nuklir

11. Tunjangan Tugas Belajar, Keppres no. [57 tahun 1986](#)
12. Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan, PP no. [25 tahun 1981](#)
13. Tunjangan Pensiun, UU no. [11 Tahun 1969](#) dan PP no. [08 Tahun 1989](#)
14. Tunjangan cacat dan kematian, PP no. [12 Tahun 1981](#)
15. Tunjangan Fungsional Dosen, Perpres no. [65 Tahun 2007](#) , Keppres no. [9 Tahun 2001](#)
  
16. Tunjangan Profesi Dosen
  - Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memenuhi persyaratan, PP no. [41 Tahun 2009](#)
  - Tunjangan tugas tambahan sebagai pimpinan di PTN : Perpres no. [65 Tahun 2007](#)

### **Kesehatan PNS**

1.
  1. Perpres no. [12 tahun 2013](#) : Jaminan Kesehatan

### **Uang makan, Lembur, Honor lain-lain, Bantuan rapat, Pelatihan, Seminar, Biaya Perjalanan PNS**

1.
  1. Permenkeu No. [113/PMK.05/2012](#) : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
  
  2. PerMenkeu No. [95/PMK.02/2012](#) : Standar Biaya (SBK) Keluaran Tahun Anggaran 2013 dan [lampiran](#)
  3. PerMenkeu No. [37/PMK.02/2012](#) : Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2013 dan [Lampirannya](#)
  
  4. PerMenkeu no. [22/PMK.05/2007](#) : Pemberian Uang Makan bagi PNS

### **Tabungan Perumahan dan Tabungan Hari Tua PNS**

1.
  1. Keppres no. [46 tahun 1994](#) : Perubahan Keppres no. [14 Tahun 1993](#) tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

2. KepMenkeu no. [478/KMK.06/2002](#) : Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Diubah dengan [500/KMK.06/2004](#)

3. Keppres no. [56 tahun 1974](#) : Besarnya luran yang dipotong dari gaji PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

### **Pajak Penghasilan □ PNS**

1.

1. PP no. [80 Tahun 2010](#) : Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD ( [situs asli](#) ).

#### **Catatan**

: Peraturan Pemerintah ini menggantikan [PP 45 Tahun 1994](#)

2. [Permenkeu 262/PMK.03/2010](#) (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana [PP 80 Tahun 2010](#)

### **Daftar Urut Kepangkatan PNS**

1.

1. PP no. [15 Tahun 1979](#) : Daftar Urut Kepangkatan PNS

2. [Surat Edaran Kepala BKN 03 Tahun 1980](#) : Petunjuk Daftar Urut Kepangkatan PNS

3. Pedoman [DUK](#)

### **Pendidikan dan Pelatihan**

1.

1. PP no. [101 tahun 2000](#) : Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

2. Keppres no. [05 tahun 1996](#) : Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN [No. 11/SE/1981 dan No.181/Seklan/7/81](#) tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan

## **Tugas Belajar dan Ijin Belajar**

1.
  1. Perpres no. [12 Tahun 1961](#) : Pemberian Tugas Belajar
  2. Keppres no. [57 tahun 1986](#) : Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri
  3. [SE/18/M.PAN/5/2004](#) : SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  4. [Produk Hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar](#) untuk Dosen

## **Penyesuaian Jabatan**

1.
  1. Peraturan Pemerintah Nomor [99 Tahun 2000](#) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. [12 Tahun 2002](#) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. [12 Tahun 2002](#) : Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  3. Keputusan Ketua LAN No. [527/IX/6/4/1996](#) tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas
  4. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas ( [isinya](#) )
  5. Pengecualian terdapat di : Pasal 32 mPP. Nomor [12 Tahun 2002](#)

## **Korps PNS**

1.
  1. Keppres no. [82 Tahun 1971](#) tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
  2. [Pedoman Korps PNS](#)

## **Anggaran Korps PNS**



1.
  1. Keppres no. [16 Tahun 2005](#) : Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (mencabut Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000)
  2. Keppres no. [93 Tahun 2001](#) : Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
  3. Keppres no. [63 Tahun 1994](#) : Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), (mencabut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 beserta lampirannya)
  4. [Pedoman anggaran Korps PNS](#)

### **Sumpah/Janji PNS**

1.
  1. PP no. [21 Tahun 1975](#) : Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  2. Perpres no. [11 tahun 1959](#) : Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
  3. Surat Edaran Kepala BKN no. [14/SE/1975](#) : Petunjuk Pengambilan Sumpah, Janji PNS

### **Moral Etika PNS**

1.
  1. PP no. [42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
  2. [Pedoman Moral Etika PNS](#)

### **Displin PNS**

1.
  1. PP no. [53 Tahun 2010](#) : Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  2. Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. [21 Tahun 2010](#)
  3. [Pedoman Displin PNS](#)

## **Penilaian Kineja PNS**

1.
  1. PP no. [46 Tahun 2011](#) : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  2. Perka BKN no. [1 Tahun 2013](#) : Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor [46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di [sini](#) ( membatalkan SE Kepala BKN no. [02/SE/1980](#) )
  3. Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS ( [Perka BKN No. 20 Tahun 2011](#) )
  4. [Pedoman Penilaian Kinerja PNS](#)
  5. [Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS](#) (DP3)

## **Cuti PNS**

1.
  1. PP no. [24 Tahun 1976](#) : Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau [di sini](#)
  2. SE Kepala BAKN no. [01/SE/1977](#) : Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
  3. [Cuti Tahunan](#) , [Cuti Sakit](#) , [Cuti Besar](#) , [Cuti Bersalin](#) , [Cuti Alasan Penting](#) dan [Cuti di luar Tanggungan Negara](#) (CLTN)

## **Pemindahan/Mutasi PNS di Lingkungan Kemdikbud**

1.
  1. Permendikbud no. [61 Tahun 2009](#) : Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (termasuk pejabat yang berwenang lakukan mutasi)
  2. [SE/15/M.PAN/2004](#) : SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  3. [Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009](#) : Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
  4. [SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001](#) : Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi

5. [44128/A2.IV/KP/2000](#) : Edaran Sekjen Kemdikbud: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud

### **Pemindahan/Mutasi PNS**

1. PP no. [63 tahun 2009](#) : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. [9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
2. Kepka BKN no. [70 KEP 2003](#) : Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanreg BKN untuk menetapkan SK dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian
3. KepKa BKN no. [15 Tahun 2003](#) : Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
4. Kepka BKN no. [13 Tahun 2003](#) : Juknis Pelaksanaan PP no. [9 Tahun 2003](#)

### **Penghargaan dan Sanksi PNS**

1.
  1. [Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian](#)
  2. PP no. [24 Tahun 2011](#) : Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya atau di [sini](#)
  3. PP no. [83 Tahun 2008](#) : Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
  4. Surat kepala BKN no. [K.26-30/V.326-2/99](#) tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di [sini](#)
  5. [Pedoman Penghargaan dan Sanksi PNS](#)

### **Pemberhentian PNS**

1.
  1. PP no. [44 Tahun 2011](#) : Perubahan Ketiga PP no. [32 Tahun 1979](#) tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Pertama PP no. [1 Tahun 1994](#), Perubahan kedua PP no. [65 Tahun 2008](#)
  2. PP no. [04 Tahun 1966](#) : Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
  3. SE Kepala BKN no. [04 tahun 1980](#) : Pemberhentian PNS

4. [Pedoman Pemberhentian PNS](#)

**Pensiun PNS**

- 1.
1. [Daftar Batas Usia Pensiun PNS](#) (update 09 Desember 2012)
2. UU no. [11 Tahun 1992](#) : Dana Pensiun
3. UU no. [11 Tahun 1969](#) : Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
4. PP no. [08 Tahun 1989](#) : Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
5. Kepka BKN no. [14 tahun 2003](#) : Juknis tentang Pemberhentian PNS dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya
6. PP no. [05 tahun 1987](#) : Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
7. PP no. [22 tahun 1984](#) : Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya

**Besaran Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya**

- 1.
1. PP no. [18 Tahun 2012](#) : Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan [Lampirannya](#)
2. PP no. [04 Tahun 1982](#) : Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun